

DAFTAR PUSTAKA

- 123dok. (t.thn.). *Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Bekasi Utara Visi, misi, tujuan dan strategi*. Diambil kembali dari 123dok.com: <https://text-id.123dok.com/document/ozl97kngz-sejarah-dan-perkembangan-kpp-pratama-bekasi-utara-visi-misi-tujuan-dan-strategi.html>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 21 No 2*, 349-366.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). Atasi Krisis Akibat COVID-19, Pemerintah Responsif Rumuskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2021). BERITA RESMI STATISTIK : Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto. *No.13/02/Th. XXIV*, 38-39.
- Cahyonowati. (2012). PERANAN ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Vol 4 No 1*, 21-28.
- Damayanti, W. A. (2021, Mei 22). Kastrad Beraksi#2 : Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19.
- Darussalam. (2021, Maret 17). *Ini 3 Tren Pemeriksaan Pajak Menurut Pakar*. Diambil kembali dari news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/ini-3-tren-pemeriksaan-pajak-menurut-pakar-28483>
- DDTC News. (2020, April 17). *SE-23/2020 Diperpanjang Lagi, Pelayanan Langsung DJP Berhenti Hingga 29 Mei 2020*. Diambil kembali dari <https://news.ddtc.co.id/diperpanjang-lagi-pelayanan-langsung-djp-berhenti-hingga-29-mei-2020-20364>
- DDTC News. (2021, Maret 22). *PEMERIKSAAN PAJAK (6) Ada 3 Standar dalam Proses Pemeriksaan Pajak, Apa Saja?* Diambil kembali dari news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/ada-3-standar-dalam-proses-pemeriksaan-pajak-apa-saja-28608>
- djponline. (2020, Agustus 18). *Penagihan Pajak di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/artikel/penagihan-pajak-di-masa-pandemi](https://www.pajak.go.id/id/artikel/penagihan-pajak-di-masa-pandemi)

- Herman. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.7 No.1*, 83-105.
- Irsutami, I., Danar, I., Ikhlah, M., & Riadi, S. (2020). Model pembelajaran project based learning. *audit kepatuhan. Journal of Applied Managerial Accounting Vol 4 No2*, 323-335.
- Kemenkeu dikutip Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021.
- Kemenkeu Direktorat Jendral Anggaran. (2020, April 27). PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19.
- Kementerian Keuangan. (2017-2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)*. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>
- Kementerian Keuangan. (2019). *APBN 2019*. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Keuangan. (2021, Agustus 31). Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, namun Tetap Waspada terhadap Pandemi Covid.
- Kementerian Keuangan. (2021, January 4). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Kementerian Keuangan Sekretariat Jendral. (2020, Mei 18). *Bagaimana Seharusnya Auditor Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Audit*. Diambil kembali dari setjen.kemenkeu.go.id: <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/bagaimana-seharusnya-auditor-merespons-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-audit>
- KKP Supriyanto & Rekan. (2020, Juli 20). *DJP Terapkan Protokol Kenormalan Baru*. Diambil kembali dari supriyantorekan.com: <https://www.supriyantorekan.com/2020/07/mulai-15-juni-2020-layanan-perpajakan.html>
- klikpajak. (t.thn.). *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama*. Diambil kembali dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>

- klikpajak.id. (2022, Maret 3). *Jawaban Mengapa Data Penerimaan Pajak Tercantum dalam APBN*. Diambil kembali dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/mengapa-data-penerimaan-pajak-tercantum-dalam-apbn-2/>
- pajak.go.id. (2021). *pemeriksaan*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan>
- pajakku. (2021). *Mengenal Lebih tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)*. Diambil kembali dari www.pajakku.com: [https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-\(DTP\)](https://www.pajakku.com/read/612ef8badcd4b57133ed20bd/Mengenal-Lebih-tentang-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-(DTP))
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keua. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja dari Kantor (Work from Office) dan Bekerja dari Rumah (Work from Home) dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direkto. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pera. (t.thn.).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan. (t.thn.).

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya. (t.thn.).